

Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Desa Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Desa Teluk Sasah Kabupaten Bintan

Dwi Valentina Sihite¹, Yakobus Ndona², Sri Yunita³, Budi Ali Mukmin⁴,
 Windawati Pinem⁵

¹²³⁴⁵Universitas Negeri Medan

Email: dwivlntinasihite@gmail.com

Kata kunci

Dana Desa,
 Efektivitas Kebijakan,
 Kesejahteraan
 Ekonomi, Masyarakat
 Nelayan,
 Pemberdayaan
 Pesisir

Abstrak

Kebijakan dana desa dari APBN merupakan instrumen fiskal untuk mempercepat pembangunan lokal. Namun, kenaikan anggarannya belum berdampak optimal bagi kesejahteraan nelayan tradisional. Penelitian ini menganalisis efektivitas pemanfaatan dana desa terhadap ekonomi nelayan di Desa Teluk Sasah, Kabupaten Bintan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis memadukan Teori Efektivitas Richard M. Steers dengan prinsip tata kelola (transparansi, akuntabilitas, partisipasi). Hasilnya, pemanfaatan dana belum optimal. Secara administratif, bantuan alat tangkap berhasil disalurkan. Namun, secara *outcome*, bantuan gagal mendongkrak pendapatan akibat distribusi tidak proporsional dan minimnya program pemberdayaan substantif seperti pelatihan pascapanen. Tata kelola juga masih sebatas formalitas prosedural, sementara partisipasi nelayan terjebak pada level tokenisme tanpa pelibatan nyata dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini merekomendasikan transformasi pengelolaan dana desa dari pendekatan bantuan fisik (*charity-based*) menuju pemberdayaan berkelanjutan (*empowerment-based*).

Keywords

Coastal
 Empowerment,
 Economic Welfare,
 Fishermen
 Community, Policy
 Effectiveness, Village
 Funds

Abstract

The village fund policy from the state budget is a fiscal instrument to accelerate local development. However, its budget increases have not optimally improved traditional fishermen's welfare. This study analyzes the effectiveness of village fund utilization on the economic welfare of fishermen in Teluk Sasah Village, Bintan Regency. Using a descriptive qualitative approach, data was gathered through observation, documentation, and interviews. The analysis integrates Richard M. Steers' Organizational Effectiveness Theory with governance principles (transparency, accountability, participation). The results show that fund utilization is not yet optimal. Administratively, fishing gear aid was successfully distributed. However, regarding outcomes, the assistance failed to boost income due to disproportionate distribution and a lack of substantive empowerment programs, such as post-harvest training. Governance remains limited to procedural formality, while fishermen's participation is trapped at the tokenism level without genuine involvement in decision-making. This study recommends transforming village fund management from physical aid (*charity-based*) to sustainable empowerment (*empowerment-based*).

Pendahuluan

Pembangunan desa telah diposisikan sebagai pilar prioritas dalam arsitektur kebijakan nasional pemerintah Indonesia guna mengikis disparitas ekonomi antardaerah dan menciptakan pemerataan kesejahteraan yang inklusif (Supriadin & Wardan, 2024). Desa bukan lagi sekadar lokus sekunder atau objek pasif dari sirkulasi kebijakan pusat, melainkan telah bergeser menjadi subjek otonom yang memegang kendali atas artikulasi potensi dan pemenuhan kebutuhan lokalnya sendiri (Sasongko, 2022). Perubahan paradigma pembangunan ini secara yuridis dimotori oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut memberikan kewenangan atribusi yang luas kepada pemerintahan desa untuk mengurus tata kelola kelembagaan, keuangan, pembangunan infrastruktur, hingga program pemberdayaan berbasis kearifan dan modal sosial setempat.

Sebagai konsekuensi logis dari mandat desentralisasi fiskal tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa yang ditransfer langsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Komitmen fiskal ini terus menunjukkan tren peningkatan yang masif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, alokasi dana desa secara nasional tercatat sebesar Rp20,76 triliun, dan angka tersebut melonjak tajam hingga melampaui Rp70 triliun pada tahun 2023 (Pintar et al., n.d.-a). Penggelontoran dana dalam skala besar ini mengusung misi mulia: mengoptimalkan pelayanan publik, menggerakkan roda ekonomi perdesaan, mengurangi kemiskinan struktural, dan mengelevasi derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Namun, realitas empiris di lapangan sering kali menunjukkan adanya jurang pemisah (*gap*) yang lebar antara besarnya serapan anggaran fiskal dan capaian kesejahteraan substantif masyarakat perdesaan. Berbagai kajian terdahulu menegaskan bahwa peningkatan alokasi dana desa tidak secara otomatis berimplikasi pada penurunan angka kemiskinan atau peningkatan kemandirian ekonomi warga (Kumenaung, 2021). Pola pemanfaatan anggaran di sebagian besar desa masih didominasi oleh proyek-proyek fisik-struktural yang bersifat padat modal (*capital-intensive*) seperti pengaspalan jalan, pembuatan jembatan, dan renovasi kantor desa. Sebaliknya, alokasi anggaran yang diarahkan pada program intervensi nonfisik, khususnya pemberdayaan kapasitas ekonomi sektor produktif lokal, cenderung terpinggirkan dan dikelola secara sporadis tanpa desain keberlanjutan yang matang.

Fenomena ketidakefektifan pengelolaan dana desa ini diperparah oleh lemahnya tata kelola kelembagaan di tingkat pemerintahan desa. Studi yang dilakukan oleh Zethsander Djawa Liunokas et al. (2024) mengindikasikan bahwa sekalipun tata kelola anggaran desa secara prosedural telah mengikuti koridor regulasi formal, dampaknya terhadap kesejahteraan tetap minimal akibat lemahnya fungsi kontrol, pembinaan aparat, dan ketidaktepatan sasaran program. Di sisi lain, rendahnya keterlibatan warga dalam

ruang musyawarah perencanaan pembangunan desa (*Musrenbangdes*) berujung pada lahirnya kebijakan yang top-down dan kehilangan relevansi dengan urgensi kebutuhan riil yang dihadapi oleh kelompok masyarakat rentan (Nugroho, 2021).

Dari sudut pandang kebijakan publik, efektivitas suatu program tidak boleh hanya diukur dari aspek serapan anggaran atau penyelesaian output fisik semata, melainkan harus dinilai dari sejauh mana program tersebut mampu memicu outcome dan impact perubahan sosial-ekonomi ke arah yang lebih baik (Dwiyanto, 2015). Mengacu pada kerangka konseptual Richard M. Steers, efektivitas sistem intervensi sosial menuntut adanya pemenuhan tiga dimensi utama, yaitu pencapaian tujuan (*goal attainment*), keterpaduan internal-eksternal (*integration*), dan kapasitas adaptasi lingkungan (*adaptation*). Ketika tata kelola dana desa mengabaikan ketiga indikator substantif ini, maka kegagalan kebijakan (*policy failure*) menjadi hal yang tak terelakkan.

Konteks ketidakefektifan ini menjadi sangat krusial apabila diteropong pada karakteristik wilayah pesisir maritim seperti Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), khususnya di Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan. Secara geografis, Desa Teluk Sasah memiliki garis pantai yang strategis dengan potensi sumber daya perikanan tangkap yang sangat melimpah. Mayoritas masyarakat di desa ini menggantungkan keberlangsungan hidupnya pada sektor kelautan sebagai nelayan tradisional. Sejalan dengan arah kebijakan strategis pemerintah pusat dalam penguatan kedaulatan pangan nasional dan peningkatan taraf hidup pelaku sektor riil perikanan, pemerintah Desa Teluk Sasah telah mengalokasikan sebagian anggaran dana desa (periode 2022–2025) untuk program bantuan alat tangkap dan perlengkapan melaut.

Namun, peningkatan alokasi dana desa di Desa Teluk Sasah tidak linier dengan perbaikan indikator kesejahteraan rumah tangga nelayan lokal. Nelayan tradisional di wilayah ini masih terperangkap dalam lingkaran kerentanan sosial-ekonomis akibat keterbatasan modal, fluktuasi harga jual hasil tangkapan yang didikte oleh tengkulak, serta tingginya biaya operasional melaut (Bismar Arianto, 2019). Intervensi program dari dana desa berupa pembagian jaring, aki, alat penerang, dan life jacket belum memberikan daya ungkit yang signifikan terhadap produktivitas hasil tangkapan maupun stabilitas pendapatan nelayan. Sebagian besar bantuan dibagikan secara seragam kepada kelompok-kelompok nelayan tanpa adanya proses identifikasi kebutuhan yang akurat, pendampingan teknis, pengawasan pemanfaatan, maupun pelatihan diversifikasi usaha pengolahan pascapanen.

Selain aspek ekonomi-pembangunan, dinamika pengelolaan dana desa di Desa Teluk Sasah juga memunculkan persoalan mendasar dalam ranah pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) dan tata kelola demokratis lokal. Menurut Zamroni (2011), pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya bertujuan untuk menginternalisasikan keterampilan partisipatif (*participatory skills*) dan sikap demokratis yang bertanggung jawab dalam kehidupan publik. Pengelolaan dana desa seharusnya

menjadi ruang artikulasi nyata bagi warga negara untuk mempraktikkan nilai-nilai Pancasila khususnya sila keempat yang menekankan musyawarah mufakat dan sila kelima mengenai keadilan sosial melalui keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran (Hidayatullah & Afiqoh, 2023). Namun, realitas di Desa Teluk Sasah menunjukkan minimnya ruang partisipasi substantif bagi nelayan kecil, yang mencerminkan adanya *gap* lebar antara konsep ideal kewarganegaraan demokratis dan realitas sosiologis di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini bermaksud mengurai hambatan struktural dan kultural yang melingkupi efektivitas pemanfaatan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Teluk Sasah, Kabupaten Bintan.

Metode

Metodologi penelitian ini menggunakan desain penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif guna memahami dinamika sosiologis pemanfaatan dana desa secara mendalam, holistik, dan kontekstual. Penelitian dilaksanakan di Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, yang dipilih secara sengaja (*purposive*) berdasarkan pertimbangan sosio-ekonomis yang krusial. Penentuan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yang mencakup Kepala Desa (Suhairy), Sekretaris Desa, Kepala Dusun sekaligus Ketua RT (Syarifuddin), serta sejumlah masyarakat nelayan tradisional penerima manfaat seperti Rustam Effendi, Muhamad Noor, Kamaruddin, Suhardi, dan Agat.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer, yang berupa rekaman audio serta transkrip naratif hasil wawancara mendalam di lokasi, dan data sekunder, seperti Laporan Realisasi Anggaran APBDes Teluk Sasah tahun 2022–2025, profil demografi desa, serta literatur ilmiah terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yakni observasi lapangan nonpartisipan untuk melihat kondisi fisik bantuan di wilayah pesisir, wawancara mendalam semi-terstruktur menggunakan pedoman khusus, serta studi dokumentasi terhadap arsip administratif-yuridis dan notulen musyawarah desa. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara interaktif dan berkelanjutan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi..

Hasil dan Pembahasan

Hasil

1. Ketidaktercapaian Tujuan Program Bantuan Nelayan (*Goal Attainment*)

Kebijakan pengalokasian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dirancang secara normatif sebagai instrumen fiskal strategis

untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, serta mengentaskan kemiskinan di tingkat lokal. Dalam konteks wilayah pesisir Kabupaten Bintan, khususnya di Desa Teluk Sasah, sektor kelautan dan perikanan memegang peranan vital karena sebagian besar penduduknya menggantungkan roda perekonomian sebagai nelayan tradisional. Pemerintah Desa Teluk Sasah secara konsisten mengalokasikan porsi anggaran dari Dana Desa setiap tahun fiskal untuk melaksanakan program pemberdayaan dan bantuan sektor perikanan guna mendongkrak produktivitas kerja nelayan di laut.

Secara administratif-formal, birokrasi pemerintahan desa mengklaim bahwa program bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan telah berjalan dengan sukses dan mencapai tingkat efektivitas 100% berdasarkan penyerapan anggaran yang tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Klaim normatif ini ditegaskan oleh Kepala Desa Teluk Sasah, Suhairy, dalam sesi wawancara mendalam yang menyatakan Penyaluran bantuan kepada nelayan telah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat, khususnya dalam bentuk penyediaan alat tangkap dan perlengkapan pendukung kegiatan penangkapan ikan.

Pernyataan tersebut mencerminkan sudut pandang birokratis yang melihat keberhasilan pembangunan dari perspektif terserapnya pagu anggaran dan terealisasinya pengadaan barang fisik di atas kertas. Namun, ketika kerangka evaluasi diperluas menggunakan teori efektivitas organisasi Richard M. Steers, pencapaian tujuan (*goal attainment*) tidak boleh berhenti sekadar pada tercapainya output formal berupa distribusi barang. Efektivitas yang hakiki menuntut adanya transformasi dari output fisik menuju outcome fungsional, yakni peningkatan kesejahteraan ekonomi nyata berupa kenaikan pendapatan bersih rumah tangga nelayan.

Ketika klaim birokrasi tersebut diuji silang (*cross-check*) dengan realitas sosiologis di tingkat akar rumput, ditemukan anomali yang cukup kontras. Bantuan alat tangkap fisik yang didistribusikan ternyata gagal bertransformasi menjadi pendorong peningkatan kapasitas produksi tangkap. Syarifuddin, seorang kepala RT yang juga aktif sebagai nelayan tradisional di Desa Teluk Sasah, mengungkapkan realitas empiris tersebut Bahwa alat tangkap yang diberikan masih belum mampu menggantikan peralatan lama yang telah mengalami kerusakan maupun meningkatkan kapasitas produksi perikanan secara optimal.

Kegagalan pencapaian tujuan ini berakar pada ketidaksesuaian spesifikasi teknis bantuan dengan karakteristik gelombang, jenis ikan target, dan tingkat keausan alat tangkap yang dihadapi nelayan di lautan lepas. Pengadaan barang yang dilakukan pemerintah desa kerap kali diseragamkan tanpa melalui asesmen kebutuhan teknis yang mendalam (*needs assessment*), sehingga barang yang diterima nelayan bersifat mubazir atau cepat rusak dalam waktu singkat. Akibatnya, alokasi dana desa yang bernilai ratusan

juta rupiah menguap begitu saja tanpa meninggalkan dampak ekonomi yang signifikan (*multiplier effect*) bagi eskalasi taraf hidup masyarakat pesisir..

2. Rendahnya Partisipasi Nelayan dalam Perencanaan Program (*Integration*)

Dimensi kedua dalam model efektivitas organisasi Richard M. Steers adalah integrasi (*integration*), yang mengukur sejauh mana terbangunnya komunikasi yang harmonis, konsensus bersama, serta koordinasi yang erat antara pengambil kebijakan (*stakeholders*) dengan kelompok sasaran program. Di Desa Teluk Sasah, dimensi integrasi ini mengalami defisit yang cukup mengkhawatirkan. Proses perencanaan program bantuan perikanan didominasi oleh pola top-down birokratis, di mana aspirasi nelayan dipinggirkan dari meja perumusan kebijakan anggaran.

Keterasingan kelompok nelayan dari proses musyawarah perencanaan pembangunan desa (*Musrenbangdes*) diakibatkan oleh hambatan struktural dan kultural yang kompleks. Rustam Effendi, seorang nelayan tradisional penerima manfaat, memaparkan akar permasalahan tersebut secara transparan: nelayan diundang ke musyawarah desa, tetapi sering tidak hadir karena waktunya ketika musim tangkap. Sehingga kurang dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan.

Benturan waktu antara jadwal penyelenggaraan forum musyawarah desa yang kaku dengan ritme biologis serta siklus cuaca penangkapan ikan di laut menyebabkan suara nelayan lenyap dari ruang-ruang diskresi anggaran. Kelompok nelayan diposisikan secara pasif semata-mata sebagai objek penerima kebijakan yang telah matang diputuskan oleh elit desa tanpa melalui dialog intersubyektif.

Kelemahan jalinan integrasi partisipatif ini pada akhirnya diakui secara terbuka oleh Kepala Desa Teluk Sasah, Suhairy, yang memberikan catatan reflektif: Memang diakui belum ada musyawarah khusus yang melibatkan nelayan secara langsung untuk membahas bantuan ini, tapi ke depan akan perbaiki.

Pengakuan ini menegaskan bahwa komunikasi antara pemerintah desa dan komunitas nelayan selama ini bersifat satu arah (*one-way communication*). Tanpa adanya integrasi struktural yang melibatkan nelayan sejak tahap identifikasi masalah, perumusan alternatif program, hingga penentuan jenis bantuan, kebijakan dana desa yang digelontorkan cenderung mengalami alienasi sosial. Program yang dirumuskan di atas meja birokrasi sering kali tidak menyentuh akar persoalan riil yang dihadapi nelayan di lapangan.

3. Ketidaksesuaian Program dengan Kebutuhan Realitas Nelayan (*Adaptation*)

Dimensi ketiga dalam pisau analisis efektivitas Richard M. Steers adalah adaptasi (*adaptation*), yakni kapasitas suatu sistem atau program dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika lingkungan eksternal dan struktur kebutuhan nyata yang terus

berkembang di tingkat masyarakat. Di Desa Teluk Sasah, aspek adaptasi ini lumpuh akibat terjebakny birokrasi desa dalam prosedur administratif yang kaku dan mekanis, sehingga gagal merespons keragaman skala usaha nelayan tradisional.

Penelitian ini menyingkap terjadinya anomali ketidakproporsionalan matematis dalam mekanisme distribusi anggaran bantuan perikanan. Pemerintah desa menerapkan kebijakan pembagian pagu bantuan finansial yang dipukul rata (*egalitarianism-blind*) ke dalam bentuk kelompok nelayan tanpa memperhitungkan rasio jumlah anggota maupun tingkat intensitas produksi masing-masing unit usaha. Informan nelayan, Muhamad Noor, memaparkan anomali tersebut secara rinci: Bantuan alat tangkap yang diterima kelompok nelayan relatif terbatas, yaitu sekitar Rp1.000.000,00 untuk satu kelompok yang terdiri atas sepuluh anggota, lalu pembagian bantuan kepada seluruh anggota kelompok mengakibatkan setiap nelayan hanya memperoleh porsi yang kecil.

Kebijakan pembagian rata yang diimplementasikan secara birokratis demi menghindari konflik horizontal antar-warga justru melahirkan inefisiensi struktural yang fatal. Alokasi anggaran yang dipecah ke dalam nominal yang sangat kecil kehilangan daya ungkit ekonomi (*economic leverage*). Dana sebesar itu tidak cukup untuk membiayai pengadaan satu set jaring tangkap berkualitas tinggi atau mesin tempel perahu yang layak. Akibatnya, program bantuan mengalami kegagalan adaptasi terhadap realitas ekonomi pasar. Alih-alih memperkuat kapasitas produksi modal usaha nelayan, bantuan tersebut terdistribusi habis dalam bentuk barang-barang konsumtif habis pakai yang cepat usang dan tidak berdampak pada peningkatan produktivitas harian.

Pembahasan

a. Transparansi Pengelolaan Dana Desa: Ilusi Prosedural

Hasil eksplorasi empiris di Desa Teluk Sasah memperlihatkan adanya dikotomi tajam dalam implementasi prinsip transparansi keuangan publik. Pemerintah desa merasa telah memenuhi seluruh standar transparansi melalui pemasangan baliho APBDes di kantor desa dan pelaporan administratif kepada pemerintah kabupaten. Ini adalah bentuk Transparansi Prosedural-Administratif yang berorientasi pada kepatuhan hukum formal.

Namun, di mata masyarakat nelayan, transparansi tersebut hanyalah ilusi prosedural karena informasi mengenai rincian volume barang, spesifikasi teknis harga satuan alat tangkap, dan mekanisme seleksi penerima manfaat tidak pernah disosialisasikan secara terbuka dan mudah diakses. Absennya Transparansi Substantif ini melahirkan asimetri informasi (*information asymmetry*), yang membuka ruang lebar bagi terjadinya penangkapan program oleh kelompok elit lokal (*elite capture*) dan pudurnya kepercayaan publik (*public trust*) terhadap integritas aparat pemerintahan desa.

b. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Dominasi Birokrasi atas Demokrasi

Lemahnya transparansi substantif berimplikasi langsung terhadap distorsi akuntabilitas. Fenomena sosiologis di Desa Teluk Sasah mempertontonkan kuatnya dominasi Akuntabilitas Vertikal-Birokratis yang menenggelamkan Akuntabilitas Horizontal-Demokratis. Aparatur Desa Teluk Sasah menunjukkan kedisiplinan tinggi dalam menyusun dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) demi memenuhi standar audit formal dari inspektorat daerah atau pemerintah supradesa.

Kendati demikian, akuntabilitas horizontal kepada warga nelayan selaku pemilik kedaulatan dan pembayar pajak substansial diabaikan sama sekali. Tidak pernah ada forum pertanggungjawaban publik atau sidang terbuka (*public hearing*) di mana nelayan dapat menagih efektivitas penggunaan dana desa secara transparan. Akibatnya, akuntabilitas tereduksi menjadi urusan birokratis semata yang steril dari kontrol sosial masyarakat bawah.

c. Partisipasi Masyarakat: Terjebak dalam Tangga Tokenisme

Jika divalidasi menggunakan kerangka konseptual klasik Tangga Partisipasi Masyarakat dari Sherry Arnstein (1969), tingkat keterlibatan warga nelayan di Desa Teluk Sasah terperangkap pada anak tangga Tokenisme (Formalitas Semu), tepatnya pada level Informing (masyarakat sekadar diberi tahu keputusan yang telah dibuat elit) dan Consultation (masyarakat diundang rapat sekadar untuk memenuhi syarat legalitas formal tanpa memiliki daya tawar substantif).

Kehadiran nelayan dalam forum musyawarah desa tidak dimaknai sebagai keterlibatan yang berdaya (*empowered participation*). Suara dan keluhan mereka mengenai mahalnya bahan bakar minyak, hancurnya alat tangkap, serta rendahnya harga jual ikan segar di tingkat pengepul tidak pernah diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran desa. Partisipasi mereka dibajak menjadi stempel legitimasi belaka bagi program-program yang telah dirancang sepihak oleh elit desa.

d. Kondisi Kesejahteraan Ekonomi Pasca-Program: Lingkaran Subsisten

Evaluasi longitudinal terhadap potret kesejahteraan ekonomi rumah tangga nelayan di Desa Teluk Sasah pasca-penggelontoran dana desa menunjukkan ketiadaan perubahan indikator sosial yang berarti. Struktur alokasi pengeluaran ekonomi keluarga nelayan tetap berkuat pada pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan pokok harian yang mendesak (*subsistence level*).

Mereka tetap terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan struktural (*cycle of poverty*), di mana ketergantungan finansial terhadap para tengkulak atau pengijon lokal (toke ikan) tidak terputus. Bantuan dana desa yang bersifat karitatif dan sporadis terbukti tidak memiliki daya tahan ekonomi untuk mengangkat martabat finansial nelayan keluar dari kerentanan sosial pesisir.

e. Analisis Pemberdayaan Ekonomi: Urgensi Transformasi Paradigma

Akar kegagalan paling fundamental dari pengelolaan dana desa di Desa Teluk Sasah terletak pada kekeliruan paradigma mental dan orientasi filosofis para perumus kebijakan di tingkat lokal, yang selama ini memandang pembangunan kesejahteraan masyarakat semata-mata sebagai urusan proyek fisik material dan pembagian barang konsumtif sesaat. Paradigma birokratis yang terjebak pada *project-oriented mindset* ini melihat anggaran publik sebagai komoditas habis pakai yang cukup dipertanggungjawabkan melalui kelengkapan berkas administratif dan laporan realisasi penyerapan angka di atas kertas. Akibatnya, esensi dari pembangunan itu sendiri yakni memanusiakan manusia, mengangkat harkat hidup kelompok marjinal, dan membangun kemandirian ekonomi jangka panjang tereduksi menjadi rutinitas birokrasi yang steril dari denyut kehidupan masyarakat.

Kondisi tersebut melahirkan apa yang disebut dalam sosiologi pembangunan sebagai ketergantungan struktural (*structural dependency*). Ketika nelayan tradisional di Desa Teluk Sasah terus-menerus disuplai dengan bantuan alat tangkap fisik yang bersifat sporadis, parsial, dan tidak berkelanjutan, mereka tidak pernah dipersiapkan untuk menghadapi dinamika pasar yang kompetitif maupun fluktuasi eksternal sektor perikanan. Bantuan yang diberikan tanpa disertai peta jalan (*roadmap*) peningkatan kapasitas sumber daya manusia justru berpotensi mematikan inisiatif lokal, merusak mentalitas wirausaha, serta melanggengkan posisi nelayan sebagai objek pasif yang selalu menunggu uluran tangan negara tanpa memiliki daya tawar ekonomi (*bargaining power*).

Agar dana desa benar-benar berfungsi secara transformatif sebagai katalisator kesejahteraan yang sejati, wajib hukumnya dilakukan perombakan orientasi filosofis secara radikal—yakni meninggalkan secara total pendekatan berbasis amal (*Charity-Based Approach*) yang terbukti melemahkan kemandirian, dan beralih sepenuhnya menuju pendekatan berbasis pemberdayaan (*Empowerment-Based Approach*). Pendekatan pemberdayaan ini tidak memandang masyarakat nelayan sebagai kelompok rentan yang harus dikasihani melalui pembagian barang, melainkan sebagai subjek otonom yang memiliki potensi, kecerdasan lokal, dan hak fundamental untuk mengelola sumber daya ekonominya sendiri secara bermartabat.

Implementasi konkrit dari transformasi paradigma ini menuntut desain kebijakan fiskal desa yang lebih terarah, sistematis, dan berkesinambungan melalui tiga pilar utama pembangunan ekonomi pesisir:

1. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kolektif (Koperasi Nelayan Mandiri): Pemerintah desa harus mengarahkan sebagian alokasi dana desa untuk memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan ekonomi kolektif, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sektor perikanan atau koperasi nelayan yang dikelola secara profesional dan transparan oleh warga lokal.

Kelembagaan ini berfungsi sebagai penyedia modal kerja yang murah, penyedia logistik melaut (seperti bahan bakar dan es balok) dengan harga terjangkau, serta wadah penyimpanan hasil tangkapan saat harga pasar jatuh.

2. Peningkatan Kapasitas Melalui Pelatihan Pengolahan Pascapanen: Selama ini, nelayan tradisional di Desa Teluk Sasah terjebak dalam kerugian struktural karena menjual hasil tangkapan dalam bentuk ikan segar mentah (*raw materials*) yang harganya sangat ditentukan oleh tengkulak. Melalui pendekatan pemberdayaan, dana desa harus dialokasikan untuk program pelatihan teknis pengolahan hasil pascapanen seperti teknologi pengawetan modern, pembuatan produk olahan ikan bernilai tambah tinggi (*value added products*), dan manajemen pengemasan sehingga nelayan mampu menjual produk olahan dengan margin keuntungan yang jauh lebih besar.
3. Pemutusan Rantai Pasok Eksploitatif (Akses Pasar Langsung): Transformasi struktural tidak akan pernah berhasil jika nelayan masih terbelenggu oleh rantai tengkulak dan sistem ijon yang mencekik. Pendekatan pemberdayaan menuntut intervensi pemerintah desa dalam membangun ekosistem rantai pasok alternatif, yakni dengan membuka akses pasar langsung (*direct market access*) ke tingkat regional, memfasilitasi digitalisasi pemasaran hasil perikanan melalui platform e-commerce lokal, serta menghubungkan kelompok nelayan dengan jaringan industri pengolahan ikan yang lebih luas di luar wilayah Kabupaten Bintan.

Dengan mengubah haluan dari orientasi karitatif yang konsumtif menuju pemberdayaan substantif yang produktif, dana desa di Desa Teluk Sasah tidak lagi menjadi anggaran yang menguap tanpa bekas. Sebaliknya, dana tersebut akan bertransformasi menjadi modal sosial-ekonomi yang kokoh, melahirkan kemandirian finansial, dan memutus rantai kemiskinan struktural yang selama ini membelenggu kehidupan masyarakat nelayan pesisir.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap pemanfaatan dana desa di Desa Teluk Sasah, Kabupaten Bintan, kebijakan bantuan sektor perikanan belum berjalan efektif secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan tradisional karena baru sebatas berhasil pada level output administratif formal tetapi gagal mencapai outcome kesejahteraan jangka panjang. Evaluasi menggunakan kerangka Teori Efektivitas Organisasi Richard M. Steers menunjukkan adanya tiga kelemahan fundamental, yaitu kegagalan pencapaian tujuan (*goal attainment*) akibat bantuan alat tangkap yang tidak sesuai spesifikasi teknis, defisit integrasi partisipatif (*integration*) karena perencanaan program didominasi pola top-down yang meminggirkan nelayan, serta kelemahan adaptasi (*adaptation*) akibat distribusi anggaran yang dipukul rata sehingga kehilangan daya ungkit ekonomi. Dari aspek tata kelola, pengelolaan dana desa masih terjebak pada ilusi transparansi prosedural, dominasi akuntabilitas vertikal-birokratis, serta partisipasi masyarakat yang terperangkap pada tangga tokenisme

(formalitas semu), sehingga rumah tangga nelayan tetap terperangkap dalam lingkaran kemiskinan subsisten dan ketergantungan struktural. Oleh karena itu, mutlak diperlukan urgensi transformasi paradigma dari pendekatan berbasis amal (*charity-based approach*) menuju pemberdayaan berkelanjutan (*empowerment-based approach*) yang diwujudkan melalui penguatan koperasi nelayan, pelatihan pengolahan pascapanen bernilai tambah, serta pemutusan rantai pasok eksotik melalui akses pasar langsung agar dana desa mampu menjadi katalisator kemandirian ekonomi pesisir.

Referensi

- Al Habib, M., & Mulyana. (2024). Efektivitas dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(1), 45–58.
- Aminah, S., & Roikan. (2019). *Pengantar metode penelitian kualitatif* (Edisi Pertama). Prenada Media.
- Arianto, B., & Prayetno. (2019). Pemanfaatan dana desa dan kontribusi dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah kepulauan. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(2), 146–155.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Dwiyanto, A. (2015). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Hani, M. R., & Noor, M. (2027). Mekanisme pengelolaan alokasi dana desa dalam perspektif open government. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 13(1), 89–101.
- Helsa, I., & Panca Bhakti Palu, S. (2022). Penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa: Investigasi di Desa Sambo. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Ekonomi*, 3(1), 24–38.
- Hidayatullah, S., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh transparency, accountability, partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*, 3(3), 450–462.
- Ife, J. (2002). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation*. Pearson Education Australia.
- Insani, F., Harahap, I., & Syahriza, R. (2024). Analisis pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Perlis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(3), 156–160.
- Jensen, F., Frost, H., & Thomsen, L. (2019). Defining economic welfare in fisheries: Resource rent, producer surplus, and consumer surplus. *Marine Policy*, 104(3), 118–127.
- Khoiriah, S., & Meylina, U. (2017). Analisis sistem pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi keuangan desa. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 4(1), 76–88.
- Kumenaung, A. G. (2021). Efektivitas pemanfaatan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sangihe. *Jurnal EMBA*, 9(2), 297–305.
- Liunokas, Z. D., de Rozari, P. E., & Kiak, N. T. (2024). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kuatae. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(3), 102–115.
- Mendrofa, B. T. (2018). Analisis penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 2(2), 134–148.

- Moleong, L. J. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Narwadkar, S. B., Patil, R. V., & Shinde, K. S. (2023). Socio-economic conditions of fishermen community and vulnerabilities in coastal ecosystems. *International Journal of Marine Sociology*, 11(2), 201–214.
- Nugroho, I. D., Pravasanti, Y. A., & Pratiwi, D. N. (2022). Meningkatkan pembangunan fisik desa berdasarkan efektivitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 1(3), 118–125.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Raharjo, M. M. (2018). *Pengelolaan dana desa: Akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas*. Penerbit Gava Media.
- Rahim, A., Hastuti, D. R. D., Bado, B., & Astuty, S. (2022). Are social conditions important to increase household income? The case of coastal fishers in Makassar City, Indonesia. *Journal of Socioeconomics and Development*, 5(2), 179–191.
- Rappaport, J. (1984). Studies in empowerment: Introduction to the issue. *Prevention in Human Services*, 3(2-3), 1–7.
- Stevensen, R., Turere, I., Rotinsulu, D. C., & Walewangko, E. N. (2018). Efektivitas dana desa (DD) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(2), 54–68.
- Sugiarto, H., & Lestari, P. (2022). Analisis proporsionalitas anggaran fisik dan pemberdayaan ekonomi dalam APBDes. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 101–114.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Supriadin, S., & Wardan, W. (2024). Efektivitas pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan. *Economica Insight*, 1(1), 1–6.
- Valentina, R., Putera, R., & Safitri, C. (2020). Analisis pemanfaatan dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Nagari Talang Anau. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, 2(1), 234–245.
- WCED. (1987). *Our common future*. Oxford University Press.
- Zamroni. (2011). *Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif demokratisasi lokal*. Penerbit Ombak.